



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN BONE BOLANGO PADA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

$$DBH = DBHM + DBHP$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan

$$DBHPx = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}}$$

Keterangan :

DBHPx : Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan Kepada Desa X.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan paling lambat bulan Agustus Tahun 2023.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus). Paling cepat bulan Desember Tahun 2023.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Perdes tentang APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDDesa yang dipergunakan untuk :
 - a. Anggaran uang pengganti Transport Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Operasional desa, terutama terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (4) Jumlah Besaran Anggaran uang Pengganti Transport Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) perlembarnya yang tercantum dalam APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.000.
- (5) Besaran uang pengganti Transport Tim Penyampaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yang merupakan bagian Aparatur Desa/Kelurahan adalah sebesar Rp. 1.750 per SPPT sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2023, yang dibagi;

- a. Bagian Kepala Desa/Lurah sebesar 30% dari total besaran uang pengganti transport tim sebesar Rp. 1.750 per SPPT; dan
- b. Bagian Sekretaris Desa/Lurah, Kepala-Kepala Urusan/Bagian/Seksi dan Kepala-Kepala Dusun/Lingkungan dan/atau yang setara ikut berkontribusi terhadap penyampaian SPPT sebesar 70% dari total besaran uang pengganti transport tim sebesar Rp. 1.750 per SPPT.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

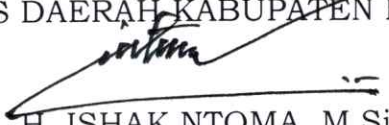
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 31 Tahun 2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023

NO	NAMA KECAMATAN / NAMA DESA	BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH	BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH	TOTAL	PENYALURAN	
		SUB TOTAL	SUB TOTAL		TAHAP 1	TAHAP II
1					60%	40%
I	KECAMATAN KABILA					
1	DUTOHE	Rp 787.602	Rp 9.768.692	Rp 10.556.294	6.333.776	4.222.518
2	TANGGILINGO	Rp 787.891	Rp 11.601.717	Rp 12.389.608	7.433.765	4.955.843
3	TOTO SELATAN	Rp 733.964	Rp 11.968.339	Rp 12.702.303	7.621.382	5.080.921
4	POOWO	Rp 652.500	Rp 9.889.430	Rp 10.541.930	6.325.158	4.216.772
5	TALANGO	Rp 1.019.053	Rp 10.652.720	Rp 11.671.773	7.003.064	4.668.709
6	POOWO BARAT	Rp 652.500	Rp 8.557.057	Rp 9.209.557	5.525.734	3.683.823
7	DUTOHE BARAT	Rp 767.700	Rp 8.326.519	Rp 9.094.219	5.456.531	3.637.688
II	KECAMATAN TAPA					
1	TALUMOPATU	Rp 15.282.901	Rp 8.692.360	Rp 23.975.261	14.385.157	9.590.104
2	TALULOBUTU	Rp 793.230	Rp 7.062.520	Rp 7.855.750	4.713.450	3.142.300
3	DUNGGA	Rp 652.500	Rp 6.672.599	Rp 7.325.099	4.395.059	2.930.040
4	LANGGE	Rp 652.500	Rp 5.962.197	Rp 6.614.697	3.968.818	2.645.879
5	TALULOBUTU SELATAN	Rp 652.500	Rp 6.223.726	Rp 6.876.226	4.125.736	2.750.490
6	KERAMAT	Rp 652.500	Rp 6.435.477	Rp 7.087.977	4.252.786	2.835.191
7	MERANTI	Rp 652.500	Rp 5.656.914	Rp 6.309.414	3.785.648	2.523.766
III	KECAMATAN SUWAWA					
1	TINGKOHUBU	Rp 963.506	Rp 10.214.145	Rp 11.177.651	6.706.591	4.471.060
2	BOLUDAWA	Rp 5.521.287	Rp 14.806.405	Rp 20.327.692	12.196.615	8.131.077
3	BUBE	Rp 747.684	Rp 7.361.394	Rp 8.109.078	4.865.447	3.243.631
4	HULUDUOTAMO	Rp 995.508	Rp 7.298.489	Rp 8.293.997	4.976.398	3.317.599
5	ULANTA	Rp 3.312.390	Rp 10.179.350	Rp 13.491.740	8.095.044	5.396.696
6	TINELO	Rp 718.891	Rp 8.804.709	Rp 9.523.600	5.714.160	3.809.440
7	BUBEYA	Rp 860.876	Rp 8.468.693	Rp 9.329.569	5.597.741	3.731.828
8	BUBE BARU	Rp 2.695.554	Rp 6.830.718	Rp 9.526.272	5.715.763	3.810.509
9	TINGKOHUBU TIMUR	Rp 773.556	Rp 6.097.168	Rp 6.870.724	4.122.434	2.748.290
10	HELUMO	Rp 1.390.566	Rp 7.013.027	Rp 8.403.593	5.042.156	3.361.437
IV	BONE PANTAI					
1	BATU HIJAU	Rp 652.500	Rp 5.147.583	Rp 5.800.083	3.480.050	2.320.033
2	BILUNGALA	Rp 2.449.377	Rp 7.553.220	Rp 10.002.597	6.001.558	4.001.039
3	BILUNGALA UTARA	Rp 652.500	Rp 5.773.489	Rp 6.425.989	3.855.593	2.570.396
4	KEMIRI	Rp 652.500	Rp 5.027.444	Rp 5.679.944	3.407.966	2.271.978
5	LEMBAH HIJAU	Rp 652.500	Rp 5.716.353	Rp 6.368.853	3.821.312	2.547.541
6	OMBULO HIJAU	Rp 652.500	Rp 4.608.790	Rp 5.261.290	3.156.774	2.104.516
7	PELITA HIJAU	Rp 652.500	Rp 4.650.413	Rp 5.302.913	3.181.748	2.121.165
8	TAMBOO	Rp 652.500	Rp 5.207.885	Rp 5.860.385	3.516.231	2.344.154
9	TIHU	Rp 897.461	Rp 6.220.304	Rp 7.117.765	4.270.659	2.847.106
10	TOLOTIO	Rp 652.500	Rp 5.664.808	Rp 6.317.308	3.790.385	2.526.923
11	TONGO	Rp 652.500	Rp 5.688.855	Rp 6.341.355	3.804.813	2.536.542
12	TUNAS JAYA	Rp 652.500	Rp 5.697.886	Rp 6.350.386	3.810.232	2.540.154
13	UABANGA	Rp 652.500	Rp 6.561.932	Rp 7.214.432	4.328.659	2.885.773
V	BULANGO UTARA					
1	BANDUNGAN	Rp 652.500	Rp 6.312.564	Rp 6.965.064	4.179.038	2.786.026
2	BOIDU	Rp 1.177.523	Rp 5.921.597	Rp 7.099.120	4.259.472	2.839.648

3	BUNUO	Rp	652.500	Rp	5.197.287	Rp	5.849.787	3.509.872	2.339.915
4	KOPI	Rp	652.500	Rp	5.454.502	Rp	6.107.002	3.664.201	2.442.801
5	LOMAYA	Rp	652.500	Rp	7.291.443	Rp	7.943.943	4.766.366	3.177.577
6	LONGALO	Rp	652.500	Rp	7.602.934	Rp	8.255.434	4.953.260	3.302.174
7	SUKA DAMAI	Rp	652.500	Rp	5.892.976	Rp	6.545.476	3.927.286	2.618.190
8	TULOA	Rp	652.500	Rp	5.404.088	Rp	6.056.588	3.633.953	2.422.635
9	TUPA	Rp	1.047.585	Rp	6.811.520	Rp	7.859.105	4.715.463	3.143.642
VI	TILONGKABILA								
1	BERLIAN	Rp	652.500	Rp	13.979.503	Rp	14.632.003	8.779.202	5.852.801
2	BONGOHLAWA	Rp	1.278.832	Rp	8.707.578	Rp	9.986.410	5.991.846	3.994.564
3	BONGOIME	Rp	1.374.258	Rp	11.376.754	Rp	12.751.012	7.650.607	5.100.405
4	BONGOPINI	Rp	652.500	Rp	8.049.195	Rp	8.701.695	5.221.017	3.480.678
5	BUTU	Rp	935.856	Rp	11.227.729	Rp	12.163.585	7.298.151	4.865.434
6	ILOHELUMA	Rp	1.049.918	Rp	10.896.746	Rp	11.946.664	7.167.998	4.778.666
7	LONUO	Rp	652.500	Rp	6.187.740	Rp	6.840.240	4.104.144	2.736.096
8	MOTILANGO	Rp	652.500	Rp	8.078.113	Rp	8.730.613	5.238.368	3.492.245
9	MOUTONG	Rp	3.589.006	Rp	17.145.466	Rp	20.734.472	12.440.683	8.293.789
10	PERMATA	Rp	652.500	Rp	8.749.610	Rp	9.402.110	5.641.266	3.760.844
11	TAMBOO	Rp	652.500	Rp	8.091.722	Rp	8.744.222	5.246.533	3.497.689
12	TOTO UTARA	Rp	1.481.162	Rp	9.718.831	Rp	11.199.993	6.719.996	4.479.997
13	TUNGGULO	Rp	652.500	Rp	8.004.680	Rp	8.657.180	5.194.308	3.462.872
14	TUNGGULO SELATAN	Rp	652.500	Rp	5.758.864	Rp	6.411.364	3.846.818	2.564.546
VII	BOTUPINGGE								
1	BUATA	Rp	652.500	Rp	8.678.500	Rp	9.331.000	5.598.600	3.732.400
2	LUWOHU	Rp	1.332.228	Rp	6.347.188	Rp	7.679.416	4.607.650	3.071.766
3	PANGGULO	Rp	652.500	Rp	6.021.905	Rp	6.674.405	4.004.643	2.669.762
4	PANGGULO BARAT	Rp	652.500	Rp	5.527.237	Rp	6.179.737	3.707.842	2.471.895
5	SUKMA	Rp	652.500	Rp	4.859.699	Rp	5.512.199	3.307.319	2.204.880
6	TANAH PUTIH	Rp	652.500	Rp	5.803.448	Rp	6.455.948	3.873.569	2.582.379
7	TIMBUOLO	Rp	2.314.419	Rp	6.151.874	Rp	8.466.293	5.079.776	3.386.517
8	TIMBUOLO TENGAH	Rp	652.500	Rp	5.687.937	Rp	6.340.437	3.804.262	2.536.175
9	TIMBUOLO TIMUR	Rp	652.500	Rp	5.579.058	Rp	6.231.558	3.738.935	2.492.623
VIII	KABILA BONE								
1	BILUANGO	Rp	652.500	Rp	6.434.149	Rp	7.086.649	4.251.989	2.834.660
2	BINTALAHE	Rp	652.500	Rp	5.560.185	Rp	6.212.685	3.727.611	2.485.074
3	BOTUBARANI	Rp	2.685.802	Rp	11.678.944	Rp	14.364.746	8.618.848	5.745.898
4	BOTUTONUO	Rp	767.215	Rp	6.317.796	Rp	7.085.011	4.251.007	2.834.004
5	HUANGOBOTU	Rp	652.500	Rp	13.939.822	Rp	14.592.322	8.755.393	5.836.929
6	MODELOMO	Rp	652.500	Rp	6.087.821	Rp	6.740.321	4.044.193	2.696.128
7	MOLOTABU	Rp	1.930.643	Rp	6.452.897	Rp	8.383.540	5.030.124	3.353.416
8	OLELE	Rp	652.500	Rp	5.886.142	Rp	6.538.642	3.923.185	2.615.457
9	OLUHUTA	Rp	652.500	Rp	6.745.543	Rp	7.398.043	4.438.826	2.959.217
IX	BONE								
1	BILOLANTUNGA	Rp	652.500	Rp	5.448.375	Rp	6.100.875	3.660.525	2.440.350
2	CENDANA PUTIH	Rp	652.500	Rp	5.002.513	Rp	5.655.013	3.393.008	2.262.005
3	ILOHUUWA	Rp	850.425	Rp	5.278.504	Rp	6.128.929	3.677.357	2.451.572
4	INO GALUMA	Rp	652.500	Rp	5.419.642	Rp	6.072.142	3.643.285	2.428.857
5	MASIAGA	Rp	808.722	Rp	5.370.737	Rp	6.179.459	3.707.675	2.471.784
6	MOLAMAHU	Rp	785.674	Rp	5.687.365	Rp	6.473.039	3.883.823	2.589.216
7	MONANO	Rp	665.573	Rp	5.564.878	Rp	6.230.451	3.738.271	2.492.180
8	MOODULIO	Rp	652.500	Rp	5.747.899	Rp	6.400.399	3.840.239	2.560.160
9	MUARA BONE	Rp	652.500	Rp	4.945.899	Rp	5.598.399	3.359.039	2.239.360
10	PERMATA	Rp	652.500	Rp	5.084.717	Rp	5.737.217	3.442.330	2.294.887
11	SOGITIA	Rp	867.164	Rp	6.571.364	Rp	7.438.528	4.463.117	2.975.411
12	TALUDAA	Rp	2.130.659	Rp	6.974.545	Rp	9.105.204	5.463.122	3.642.082
13	TUMBUH MEKAR	Rp	652.500	Rp	5.142.706	Rp	5.795.206	3.477.124	2.318.082

14	WALUHU	Rp	652.500	Rp	5.006.894	Rp	5.659.394	3.395.636	2.263.758
X	BONE RAYA								
1	ALO	Rp	652.500	Rp	5.815.994	Rp	6.468.494	3.881.096	2.587.398
2	BUNGA	Rp	652.500	Rp	5.622.255	Rp	6.274.755	3.764.853	2.509.902
3	INOMATA	Rp	652.500	Rp	5.515.354	Rp	6.167.854	3.700.712	2.467.142
4	LAUT BIRU	Rp	652.500	Rp	5.140.827	Rp	5.793.327	3.475.996	2.317.331
5	MOOPIYA	Rp	790.766	Rp	5.456.448	Rp	6.247.214	3.748.328	2.498.886
6	MOOTAWA	Rp	913.266	Rp	5.287.340	Rp	6.200.606	3.720.364	2.480.242
7	MOOTAYU	Rp	901.147	Rp	5.157.582	Rp	6.058.729	3.635.237	2.423.492
8	MOOTINELO	Rp	652.500	Rp	5.203.123	Rp	5.855.623	3.513.374	2.342.249
9	PELITA JAYA	Rp	913.266	Rp	5.643.489	Rp	6.556.755	3.934.053	2.622.702
10	TOMBULILATO	Rp	8.206.092	Rp	5.671.598	Rp	13.877.690	8.326.614	5.551.076
XI	SUWAWA TIMUR								
1	DUMBAYA BULAN	Rp	1.114.982	Rp	6.242.455	Rp	7.357.437	4.414.462	2.942.975
2	PANGGULO	Rp	652.500	Rp	4.900.375	Rp	5.552.875	3.331.725	2.221.150
3	PANGI	Rp	1.083.908	Rp	6.329.694	Rp	7.413.602	4.448.161	2.965.441
4	PODUWOMA	Rp	850.385	Rp	5.207.928	Rp	6.058.313	3.634.988	2.423.325
5	TILANGOBULA	Rp	652.500	Rp	5.481.346	Rp	6.133.846	3.680.308	2.453.538
6	TINEMBA	Rp	687.581	Rp	5.114.492	Rp	5.802.073	3.481.244	2.320.829
7	TULABOLO	Rp	652.500	Rp	5.474.053	Rp	6.126.553	3.675.932	2.450.621
8	TULABOLO BARAT	Rp	652.500	Rp	5.293.244	Rp	5.945.744	3.567.446	2.378.298
9	TULABOLO TIMUR	Rp	652.500	Rp	4.895.030	Rp	5.547.530	3.328.518	2.219.012
XII	SUWAWA SELATAN								
1	BONDARAYA	Rp	652.500	Rp	11.623.555	Rp	12.276.055	7.365.633	4.910.422
2	BONDAWUNA	Rp	652.500	Rp	5.704.193	Rp	6.356.693	3.814.016	2.542.677
3	BONEDAA	Rp	652.500	Rp	5.671.350	Rp	6.323.850	3.794.310	2.529.540
4	BULONTALA	Rp	652.500	Rp	5.685.687	Rp	6.338.187	3.802.912	2.535.275
5	BULONTALA TIMUR	Rp	652.500	Rp	5.433.103	Rp	6.085.603	3.651.362	2.434.241
6	LIBUNGO	Rp	652.500	Rp	5.839.922	Rp	6.492.422	3.895.453	2.596.969
7	MOLINTOGUPO	Rp	900.886	Rp	6.762.088	Rp	7.662.974	4.597.784	3.065.190
8	PANCURAN	Rp	652.500	Rp	5.990.662	Rp	6.643.162	3.985.897	2.657.265
XIII	SUWAWA TENGAH								
1	ALALE	Rp	2.907.585	Rp	6.597.902	Rp	9.505.487	5.703.292	3.802.195
2	DUANO	Rp	917.554	Rp	8.623.649	Rp	9.541.203	5.724.722	3.816.481
3	LOMBONGO	Rp	10.058.491	Rp	6.582.982	Rp	16.641.473	9.984.884	6.656.589
4	LOMPOTOO	Rp	652.500	Rp	5.598.983	Rp	6.251.483	3.750.890	2.500.593
5	TAPADAA	Rp	652.500	Rp	5.330.788	Rp	5.983.288	3.589.973	2.393.315
6	TOLOMATO	Rp	652.500	Rp	5.706.528	Rp	6.359.028	3.815.417	2.543.611
XIV	BULANGO ULU								
1	ILOMATA	Rp	652.500	Rp	6.230.508	Rp	6.883.008	4.129.805	2.753.203
2	MONGIILO	Rp	905.462	Rp	13.407.837	Rp	14.313.299	8.587.979	5.725.320
3	MONGIILO UTARA	Rp	652.500	Rp	6.958.661	Rp	7.611.161	4.566.697	3.044.464
4	OWATA	Rp	652.500	Rp	44.233.453	Rp	44.885.953	26.931.572	17.954.381
5	PILOLAHEYA	Rp	652.500	Rp	6.444.324	Rp	7.096.824	4.258.094	2.838.730
6	SUKA MAKMUR	Rp	652.500	Rp	5.187.798	Rp	5.840.298	3.504.179	2.336.119
XV	BULANGO SELATAN								
1	AYULA SELATAN	Rp	1.434.099	Rp	6.026.749	Rp	7.460.848	4.476.509	2.984.339
2	AYULA TILANGO	Rp	652.500	Rp	7.880.430	Rp	8.532.930	5.119.758	3.413.172
3	AYULA TIMUR	Rp	652.500	Rp	5.303.235	Rp	5.955.735	3.573.441	2.382.294
4	AYULA UTARA	Rp	652.500	Rp	6.663.778	Rp	7.316.278	4.389.767	2.926.511
5	HUNTU BARAT	Rp	652.500	Rp	6.885.021	Rp	7.537.521	4.522.513	3.015.008
6	HUNTU SELATAN	Rp	858.209	Rp	7.016.535	Rp	7.874.744	4.724.846	3.149.898
7	HUNTU UTARA	Rp	652.500	Rp	7.046.277	Rp	7.698.777	4.619.266	3.079.511
8	LAMAHU	Rp	652.500	Rp	7.437.069	Rp	8.089.569	4.853.741	3.235.828
9	SEJAHTERA	Rp	759.613	Rp	6.593.302	Rp	7.352.915	4.411.749	2.941.166
10	TINELO AYULA	Rp	783.556	Rp	6.137.976	Rp	6.921.532	4.152.919	2.768.613

XVI	BULANGO TIMUR								
1	BULOTALANGI BARAT	Rp	652.500	Rp	7.137.202	Rp	7.789.702	4.673.821	3.115.881
2	BULOTALANGI TIMUR	Rp	1.562.051	Rp	7.801.340	Rp	9.363.391	5.618.035	3.745.356
3	BULOTALANGI	Rp	652.500	Rp	7.004.358	Rp	7.656.858	4.594.115	3.062.743
4	POPODU	Rp	761.293	Rp	10.488.644	Rp	11.249.937	6.749.962	4.499.975
5	TOLUWAYA	Rp	652.500	Rp	6.876.202	Rp	7.528.702	4.517.221	3.011.481
XVII	BULAWA								
1	BUKIT HIJAU	Rp	652.500	Rp	4.991.216	Rp	5.643.716	3.386.230	2.257.486
2	DUNGGILATA	Rp	652.500	Rp	5.041.724	Rp	5.694.224	3.416.534	2.277.690
3	KAIDUNDU	Rp	838.136	Rp	5.989.988	Rp	6.828.124	4.096.874	2.731.250
4	KAIDUNDU BARAT	Rp	652.500	Rp	5.131.868	Rp	5.784.368	3.470.621	2.313.747
5	MAMUNGAA	Rp	913.266	Rp	4.999.050	Rp	5.912.316	3.547.390	2.364.926
6	MAMUNGAA TIMUR	Rp	652.500	Rp	5.927.480	Rp	6.579.980	3.947.988	2.631.992
7	MOPUYA	Rp	1.257.203	Rp	5.212.349	Rp	6.469.552	3.881.731	2.587.821
8	PATOA	Rp	652.500	Rp	5.824.863	Rp	6.477.363	3.886.418	2.590.945
9	PINOMONTIGA	Rp	850.425	Rp	5.361.829	Rp	6.212.254	3.727.352	2.484.902
XVII	PINOGU								
1	BANGIO	Rp	652.500	Rp	4.655.173	Rp	5.307.673	3.184.604	2.123.069
2	DATARAN HIJAU	Rp	652.500	Rp	4.910.955	Rp	5.563.455	3.338.073	2.225.382
3	PINOGU	Rp	789.766	Rp	4.442.443	Rp	5.232.209	3.139.325	2.092.884
4	PINOGU PERMAI	Rp	829.351	Rp	4.920.032	Rp	5.749.383	3.449.630	2.299.753
5	TILONGGIBILA	Rp	652.500	Rp	4.295.360	Rp	4.947.860	2.968.716	1.979.144
TOTAL		Rp	174.000.000	Rp	1.126.000.000	Rp	1.300.000.000	780.000.000	520.000.000

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

In. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2023

Suwawa, Agustus 2023

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN BONE BOLANGO PADA TAHUN ANGGARAN 2023

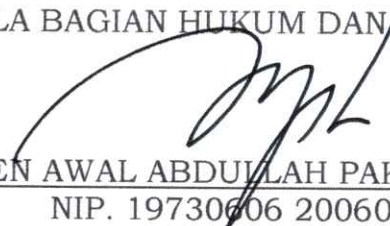
PENGELOLA : BADAN KEUNAGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDUL LAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : B-900.1.14.3/SETDA/BB/10/14/VIII/2023
Tanggal : 18 Agustus 2023
Perihal : **Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023**

- I. Dasar : a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- II. Pertimbangan : a. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 97 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa; kesehatan tingkat pertama Dikabupaten bone bolango tahun anggaran 2023;
b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelollan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Demikian telaahan Staf ini kami sampaikan atas perhatian, pertimbangan dan Persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197104071998031010